



Sejarah Pendidikan Moral dan Karakter Pancasila

Samsuri

E-mail: samsuri@uny.ac.id

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta**



Konteks Kajian

- Perspektif historis “politik pendidikan” → Kebijakan Publik → Politik Nasional
- Politik Pendidikan nasional → regulasi dan policy Pendidikan ideologi
- Negara pasca-kolonial (post-colonial) yang pluralistik
- Tantangan mutakhir → kecepatan/kemajuan teknologi, globalisasi, krisis internasional → krisis ideologi/identitas nasional
- Inisiasi penguatan ideologi dan identitas nasional melalui pendidikan
- Pendidikan Moral dan Karakter Pancasila?



PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- Tiap-tiap rezim politik di Indonesia memiliki tekad kuat untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan beragam kebijakannya. (Kalidjernih, 2005; Bourchier, 2007; Samsuri, 2010)
- Pancasila rentan ditafsirkan untuk kepentingan masing-masing periode rezim pemerintahan.
- Kegelisahan umum terhadap kajian Pancasila yang “terbatas” dalam program kurikuler sejak era reformasi.

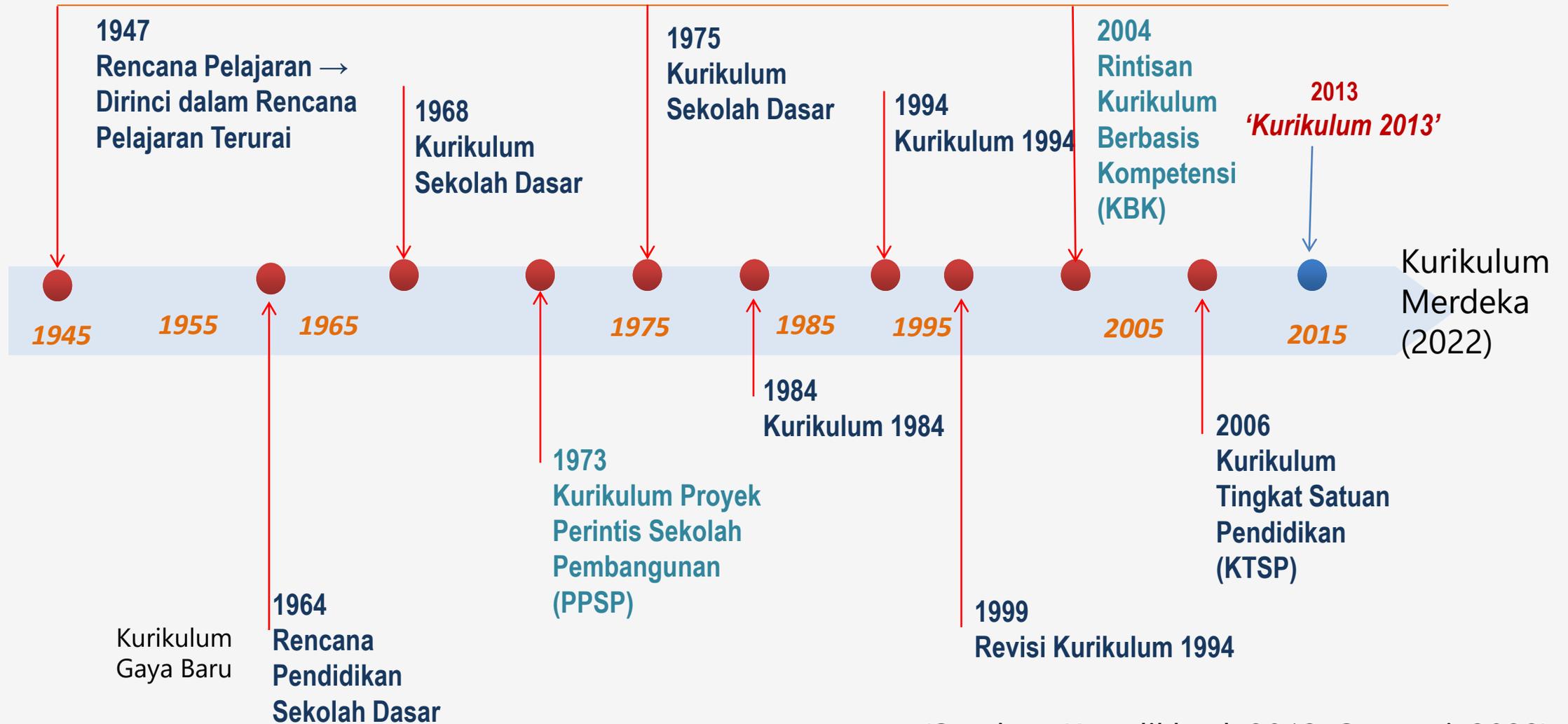


"TEKAD PEMBUMIHAN" PANCASILA

- Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai sarana implementasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada era pemerintahan Orde Baru, dicabut secara kelembagaan setelah Sidang Istimewa MPR RI bulan November 1998.
- Pasca Amandemen UUD 1945 ada upaya "restorasi Pancasila" dalam Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kampus Universitas Indonesia, Depok, 31 Mei 2006. Simposium ini selain dihadiri dan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menghadirkan kerangka berpikir alternatif dalam ber-Pancasila (FISIP UI, 2006).
- Selang tiga tahun kemudian, MPR RI hasil pemilu 2009 mengenalkan proyek sosialisasi "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" secara masif (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).
- Pada masa Presiden Joko Widodo upaya memperkuat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan dengan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (UKP-PIP) beberapa hari setelah Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017. Selanjutnya UKP PIP diubah menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) pada Maret 2018.



Perkembangan Kurikulum di Indonesia



(Sumber: Kemdikbud, 2013; Samsuri, 2022)



PERKEMBANGAN PASCA-KEMERDEKAAN

SEBELUM
ORDE
BARU

KEWARGANEGARAAN (1957),
CIVICS (1961)
KEWARGAAN NEGARA (1962)

MASYARAKAT
SOSIALIS
INDONESIA →
PANCASILA

SELAMA
ORDE
BARU

PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (1968)
PENDIDIKAN MORAL PANCASILA, (1973, 1975,
1984) PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA, PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA
NEGARA, PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (1994), PENDIDIKAN P4
→ DERIVASI PENDIDIKAN PANCASILA

MANUSIA
INDONESIA
SEUTUHNYA →
BERMORAL
PANCASILA → P4
sbg deskriptor *Civic
Virtues*

SETELAH
ORDE
BARU

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (KBK
2004, STANDAR ISI 2006)

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (VERSI RANCANGAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013)

PANCASILA

PANCASILA dan
PILAR-PILAR
KEBANGSAAN



Dinamika Pendidikan Moral & Karakter Era Sukarno (1959-1967)



Presiden Sukarno



- MANIFESTO POLITIK – UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SOSIALISME TERPIMPIN, DEMOKRASI TERPIMPIN, EKONOMI TERPIMPIN, DAN KEPRIBADIAN INDONESIA (**MANIPOL – USDEK**) → 1959
- NASIONALISME – AGAMA – KOMUNISME (**NASAKOM**)
- **Civics** → sebagai “nation and character building”
- SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA
- **Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi** (TUBAPI) menjadi materi “Pendidikan Kewarganegaraan” buku **Civics** pada 1959/1960.



Dinamika Pendidikan Moral & Karakter Era Soeharto (1967-1998)



Presiden Soeharto

- **Pendidikan Moral Pancasila** dikenalkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1973 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR RI No. II Tahun 1978 tentang **Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)** disahkan pada Sidang Umum MPR Tahun 1978, menjadi materi penataran/Pendidikan baik di sekolah, masyarakat dan keluarga.
- Pembentukan **Badan Pusat Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7)**.
- Penataran di jalur sekolah –istilah Dardji Darmodihardjo (Ketika itu Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) – dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di Kurikulum 1975 (revisi) dan Kurikulum 1984.
- Pada Kurikulum 1994 jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas Matapelajaran PMP diubah nomenklturnya sebagai matapelajaran **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**.





Kebijakan Nasional Orde Baru soal Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Kewarganegaraan

GBHN	Tujuan Pendidikan Nasional	Formulasi Pendidikan Pancasila
1973 (Tap MPR RI No. IV/MPR/ 1973)	...untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab , dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai Bangsaanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.	... kurikulum di semua tingkat pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan Jiwa dan Nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda .
1978 (Tap MPR RI No. IV/MPR/ 1978)	...untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta.
1983 (Tap MPR RI No. II/MPR/ 1983)	...untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air , agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat.
1988 (Tap MPR RI No. II/MPR/ 1988)	...untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. ...menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada Tanah Air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. ...menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. ...mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda , dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
1993 (Tap MPR RI No. II/MPR/ 1993)	...untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. ...menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. ...menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus ditingkatkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.	...pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai kejuangan, khususnya nilai 1945 , dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah.
1998 (Tap MPR RI No. II/MPR/ 1998)	...untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. ...menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. ...menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus ditingkatkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah sehingga terbentuk watak bangsa yang kukuh .



Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Era Habibie (1998-1999)



Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie

- **Pencabutan** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tentang **Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)** oleh MPR dalam Sidang Istimewa, November 1998.
- **Pembubaran** Badan Pusat Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).
- **Rekonstruksi ulang Kurikulum 1994** dengan Suplemen 1999, materi **Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** mengalami perbaikan, seiring dengan pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, yang menjadi materi di tiap topik pembahasan.
- **Penghapusan Penataran P-4** baik untuk siswa/mahasiswa, masyarakat dan Pegawai Negeri/militer.
- Penataran P-4 untuk mahasiswa di perguruan tinggi dikembalikan lagi ke Pendidikan Pancasila sebagai Matakuliah Wajib.
- **Pendidikan Kewiraan** (yang dianggap berbau militeristik) di perguruan tinggi diganti nomenklturnya menjadi **Pendidikan Kewarganegaraan**



Dinamika Pendidikan Karakter Era Gus Dur (1999-2001)



Presiden Abdurrahman Wahid

- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Umum MPR RI 1999.
- Dikenalkan **Pendidikan Budi Pekerti** (Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin)
- Banyak didominasi “**konflik politik**” antara Presiden Gus Dur dengan Parlemen, berujung kepada impeachment/pemakzulan oleh MPR RI pada Sidang Istimewa MPR bulan Juli 2001.
- Wacana permohonan maaf kepada para korban peristiwa 1965, utamanya yang mengalami stigma **G-30 S/Partai Komunis Indonesia**, mendominasi pergumulan politik nasional.
- Penyelesaian Konflik separatism di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka) dan Papua (Organisasi Papua Merdeka).
- Memperkuat pluralism berbangsa dan bernegara, pembumian nilai-nilai Pancasila, inklusivisme.
- **Perayaan Imlek** diperbolehkan dan penetapan **Kong Hu Chu** sebagai salah satu agama yang diakui keberadaannya oleh negara, selain Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha.



Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Era Megawati (2001-2004)



Presiden Megawati Soekarnoputri

- Amandemen UUD Tahun 1945 terakhir kali (keempat) tahun 2002 → pernah hidup semangat memasukkan “**Piagam Jakarta**” ke dalam proses amandemen konstitusi oleh sekelompok masyarakat Islam.
- Disahkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun, **Pendidikan Pancasila** diintegrasikan ke dalam Mata Pelajaran **Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)**.
- Dirintis Kurikulum Berbasis Kompetensi pada 2002-2004 di sekolah. Mata Pelajaran **Pendidikan Kewarganegaraan** dikenalkan untuk menggantikan Mata Pelajaran **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)** serta **Tata Negara (SMA Jurusan IPS)** Kurikulum 1994 .



Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Era Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)



Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

- Kurikulum 2006 mengintrodusir matapelajaran **Pendidikan Kewarganegaraan**
- **Restorasi Pancasila** – Simposium UI 2006 persis di Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2006
- **Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa** dikenalkan 2010
- **Kurikulum 2013** menguatkan **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** di Sekolah.
- **UU Pendidikan Tinggi 2012** menguatkan Kembali **Pendidikan Pancasila**



Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013

NOMENKLATUR (Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013
	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN		PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
MATERI KAJIAN	1. Pancasila. 2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia.		



Dinamika Pendidikan Karakter Era Joko Widodo (2014-sekarang)



Presiden Joko Widodo

- Pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) pada 2017 beriringan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, yang diubah menjadi **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)** pada tahun 2018.
- Kebijakan **Penguatan Pendidikan Karakter** (dalam Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2017) memuat lima nilai utama: **Religius, Nasionalis, Kemandirian, Gotong Royong dan Integritas**. Menjadi materi dan program di sekolah, masyarakat dan keluarga.
- Tumbuh subur pusat-pusat studi Pancasila/Wawasan Kebangsaan di perguruan tinggi, antara lain merespon suburnya gejala radikalisme dan ekstrimisme berbasis keagamaan di kampus.
- Inisiasi **"Pelajar Pancasila"** oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Renstra Kemdikbud 2020-2024.



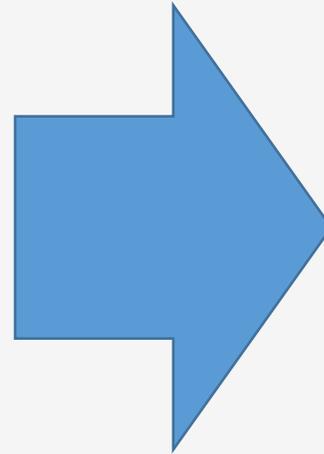
Kebijakan Pembumian Nilai-nilai Pancasila



Penguatan Wawasan Kebangsaan

1. Mengarustamakan Pancasila dalam kebijakan program pembangunan
2. Merevitalisasi pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara
3. Meningkatkan kapasitas ASN berbasis Pancasila
4. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah
5. Memantapkan dan mengembangkan sistem deteksi dini
6. Memantapkan program Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu)

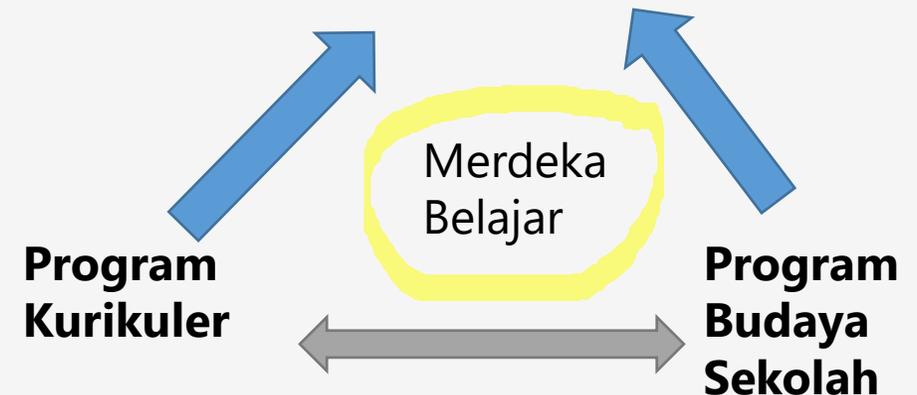
(Arah Kebijakan dan Strategi, RPJMN IV 2020-2024, p. 233)



RENSTRA KEMDIKBUD 2020-2024



PELAJAR PANCASILA





Pelajar Pancasila & Pendidikan Pancasila

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020-2024)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya ***Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.***

Profil Pelajar Pancasila

Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia

Berkebinekaan Global

Mandiri

Bergotong Royong

PELAJAR PANCASILA

Bernalar Kritis

Kreatif





Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
2	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none">revolusi mental dalam system pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. <p>(Renstra Kemdikbud 2020-2024, p. 52)</p>



ELEMEN-ELEMEN KUNCI PROFIL PELAJAR PANCASILA

Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan **enam ciri utama**: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif

Ciri Utama	Elemen-elemen Kunci
(1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia	(a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.
(2) Berkebinekaan global	mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan
(3) Bergotong royong	kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
(4) Mandiri	kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
(5) Bernalar kritis	memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.
(6) Kreatif	menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

(Renstra Kemdikbud 2020-2024, p. 33)



Kegunaan Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Rumusan Profil Pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai **kompas** bagi pendidik dan Pelajar Indonesia.

Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke Profil Pelajar Pancasila.

(Kemendikbud, 2020)



Ringkasan Dimensi dan Elemen Profil Pelajar Pancasila

Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia	Berkebinekaan Global	Bergotong royong	Mandiri	Bernalar Kritis	Kreatif
Akhlak beragama Akhlak pribadi Akhlak kepada manusia Akhlak kepada alam Akhlak bernegara	Mengenal dan menghargai budaya Komunikasi dan interaksi antar budaya Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan Berkeadilan sosial	Kolaborasi Kepedulian Berbagi	<u>Pemahaman diri dan situasi</u> <u>Regulasi diri: pengelolaan motivasi, penetapan tujuan, dan evaluasi pencapaian tujuan.</u>	<u>Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan</u> <u>Menganalisis dan mengevaluasi penalaran</u> <u>Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri</u>	<u>Menghasilkan gagasan yang orisinal</u> <u>Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal</u> <u>Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan</u>

(Kemendikbud, 2020)

Penyelarasan Penjabaran Kebijakan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Pelajar Pancasila

1. PERPRES RI NO. 87
TAHUN 2017 TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTER



- RELIGIUS
- NASIONALIS
- GOTONG ROYONG
- MANDIRI
- INTEGRITAS

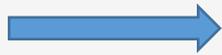
2. RENSTRA KEMDIKBUD
2020-2024



Profil Pelajar Pancasila : (1) kebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

3. DOKUMEN KURIKULUM:
- Kurikulum 2013

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
MATA PELAJARAN → TEMATIK TERPADU (SD),
MAPEL PPKn (SMP/MTs, SMA/MA/SMK)



Porsi utama bertumpu pada Mata
Pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn)/
Pendidikan Pancasila

- Kurikulum Merdeka (2022)

Capaian Pembelajaran dan Fase-fase
Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran



KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Peta Jalan
Penguatan
Nilai-nilai
Pancasila di
Satuan
Pendidikan

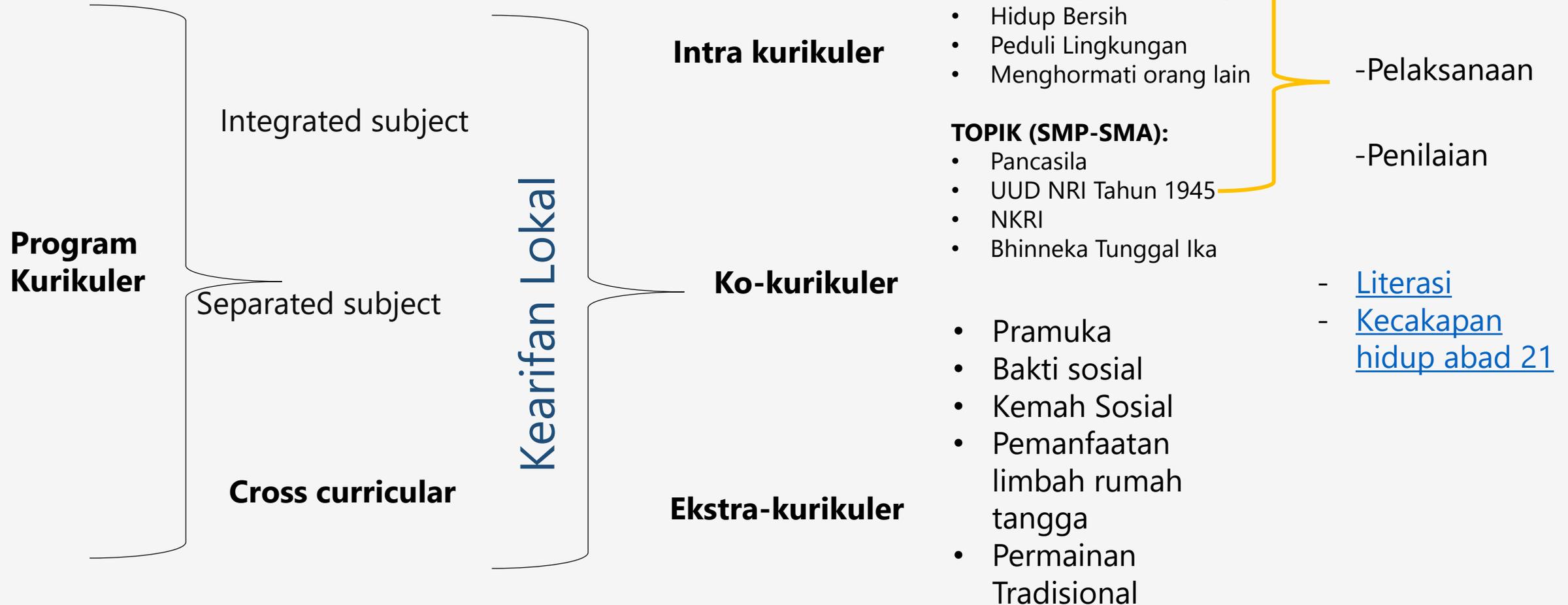
Program
Penguatan
Nilai-nilai
Pancasila di
Satuan
Pendidikan

Pelajar
Pancasila



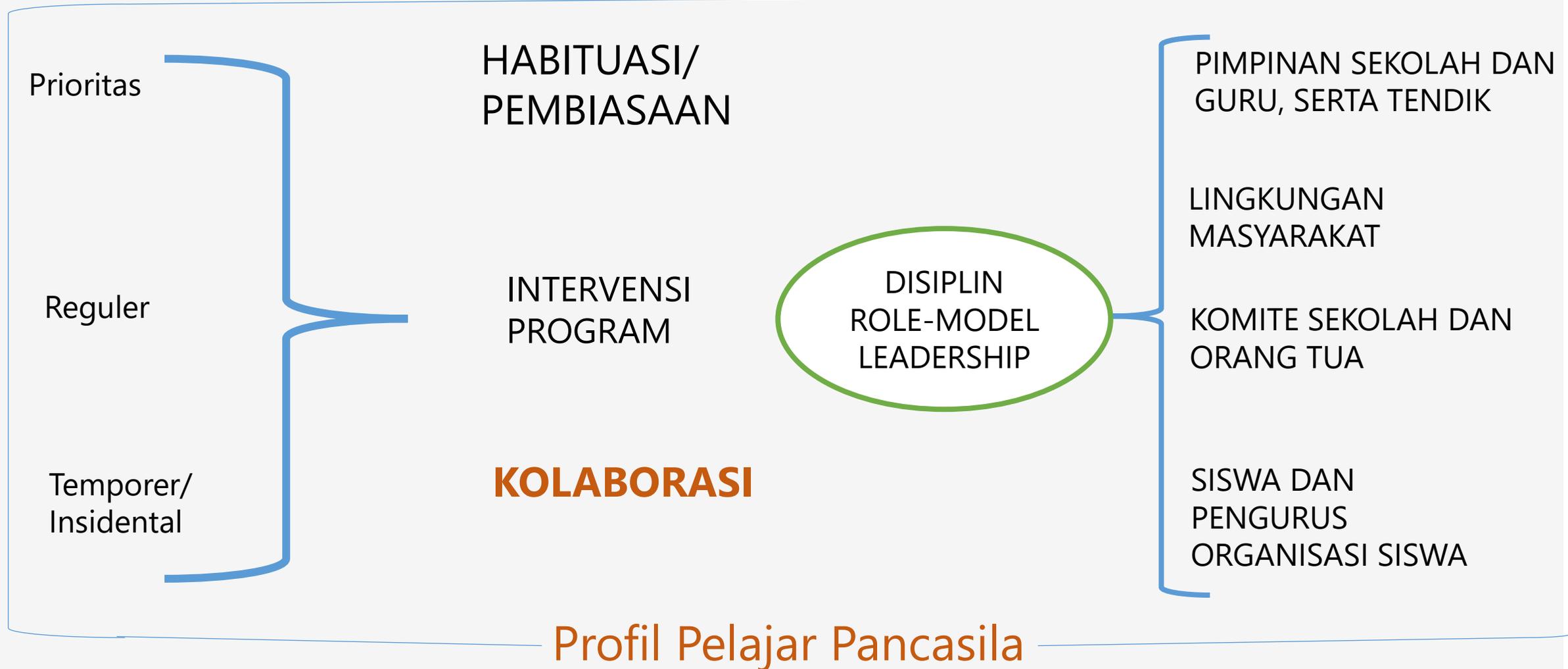
Penjabaran Nilai-nilai Karakter Pancasila dalam Program Kurikuler Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Struktur dan Isi Program





PENGEMBANGAN KARAKTER PELAJAR PANCASILA DALAM PROGRAM BUDAYA SEKOLAH



ADAKAH PERTANYAAN-PERTANYAAN?

Terimakasih

Profil Samsuri



Lahir di Haurgeulis, Indramayu, 19 Juni 1972

email : samsuri@uny.ac.id samsuri.uny@gmail.com

Blog : samsuriuny.wordpress.com

Web: <http://staffnew.uny.ac.id/staff/132300167>

Riwayat Pendidikan :

S1 PMP-KN IKIP YOGYAKARTA (Lulus 1997)

S2 Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Lulus 2000)

S3 Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (Lulus 2010)

Unit Kerja

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1 & S2)

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta